



Fraksi Hanura

Apresiasi Nilai WDP Keuangan Kalbar

Fraksi Hanura, DPRD Kalbar melalui juru bicaranya Drs. Timotius Ketak menyampaikan apresiasi terhadap pencapaian nilai Wajar dengan Pengecualian (WDP)

dalam APBD Kalbar. Fraksi ini juga menyampaikan beberapa kritikan terhadap pemerintah provinsi Kalbar. Berikut petikannya.

...Ke Halaman -11

Apresiasi Nilai WDP Keuangan Kalbar

Fraksi kami Fraksi HANURA mendukung terhadap berbagai upaya penataan baik dari sisi manajemen Pemerintahan, Pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat agar Visi yang di harapkan yakni "Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya dan sejahterah" dapat di wujudkan.

Masih banyak hal yang harus dibenahi, terutama infrastruktur baik jalan, energi dan lain-lain. Permasalahan sebagai akibat dari ekonomi jang selalu digunakan sebagai alasan sebagai penghambat jalannya proses pembangunan karena selama masa krisis ekonomi masyarakat Kalimantan barat bisa bertahan terutama di sektor riil. Bahkan ada joke dari mereka agar krisis ekonomi ini tidak selesai. Karena pada masa itu masyarakat terutama yang bergerak di sector riil bisa memanfaatkan dengan baik.

Fraksi kami Fraksi HANURA memberikan apresiasi atas keberhasilan yang dicapai Pemda Kalbar, karena dalam Pemeriksaan BPK RI, Kalimantan Barat dinilai wajar dengan pengecualian (WDP), artinya apa bahwa Pemerintah Daerah mampu mempersatukan penilaian tersebut. Ke depan kita semua berharap agar penilaian BPKRI bisa ditingkatkan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Seperti apa yang di sampaikan Gubernur untuk mencapai itu tidak mudah, di perlukan tanggung jawab yang tinggi dari seluruh jajaran pemerintahan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam rangka me-

ningkatkan fungsi SKPD dengan unit kerja yang ada di bawahnya. Oleh karena itu Fraksi kami Fraksi HANURA mendukung upaya yang di lakukan Gubernur untuk melaksanakan MOU dengan BPK Perwakilan Kalimantan Barat sehubungan dengan pengembangan dan pengelolaan system informasi untuk akses data pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara / daerah.

Mencermati laporan BPKRI, terutama terkait masalah pembangunan daerah perbatasan, Fraksi kami sangat mendukung apa yang di sampaikan oleh beliau yaitu perlu adanya INPRES untuk pembangunan daerah perbatasan. Perbatasan terutama Kalimantan Barat dengan SERAWAK memiliki karakteristik yang unik baik dilihat dari kondisi geografi maupun kondisi demografi.

Saran ini adalah saran yang cukup elegan yang perlu di indakanjuti agar pembangunan daerah perbatasan sebagai beranda depan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kita harus berupaya keras agar saran ini bisa ditindaklanjuti dengan membentuk tim khusus agar INPRES perbatasan bisa direalisasikan.

Anggota DPR RI dan DPD dan Dapil Kalimantan Barat harus dilibatkan. Karena mereka memiliki akses ke Pemerintah dan bisa menekan kepada Pemerintah Pusat.

Fraksi kami Fraksi HANURA sangat memperhatikan saran dari BPKRI tentang penataan administrasi keuangan terutama

masalah asset. Disadari atau tidak, penataan asset di Pemerintah Provinsi juga Kabupaten perlu mendapatkan perhatian yang serius, kalau kita semua ingin mendapatkan penilaian WTP. Masih banyak asset kita yang bergerak maupun tidak bergerak yang belum terdata dengan baik. DPRD telah lama meminta kepada pemerintah provinsi untuk mendata hal ini. Namun masih belum terlaksana. Kami menyadari bahwa SDM yang diperlukan masih sangat terbatas. Oleh karena itu saran BPKRI untuk membentuk Tim Pemeriksa Aset perlu didukung. Bahkan apabila diperlukan DPRD membentuk Pansus Penataan Aset. Agar kita semua secara transparan dapat mengetahui asset - asset Pemerintah Provinsi yang sebenarnya.

Hal lain yang mendapatkan perhatian Fraksi kami adalah tindak lanjut dalam penanganan temuan BPK belum optimal, terutama dalam penyelesaian kerugian daerah.

Badan Tuntutan Pebendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang dipimpin Sekretaris Daerah belum banyak berbuat. Sampai saat ini Kalimantan barat belum memiliki peraturan daerah dalam rangka menangani tindak lanjut temuan BPKRI tentang penyelesaian kerugian daerah.

Walaupun belum memiliki Perda tetapi kita masih bisa menggunakan peraturan yang lebih tinggi. DPRD juga telah merekomendasikan Hal hal yang perlu mendapatkan penyelesaian dari temuan BPKRI, namun realisasinya juga masih sangat rendah.